

**SINERGITAS KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DALAM MEMBANTU
PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK DI KOTA SURABAYA TAHUN 2018
(STUDI KASUS: TEROR BOM 3 GEREJA)**

**SYNERGITY OF REGIONAL INTELLIGENCE COMMUNITY TO HELP
PREVENTION OF CONFLICT POTENTIALS IN SURABAYA CITY IN 2018
(CASE STUDY: BOMB TERROR 3 CHURCH)**

Apriles Lusein¹, Gede Sumertha², Bambang Wahyudi³

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas
Pertahanan
(rinodwipa@gmail.com)

Abstrak – Aksi teror yang terjadi di kota Surabaya merupakan dampak dari kerusuhan di rutan cabang Salemba di kompleks Mako Brimob Kelapa Dua, Jawa Barat. Aksi ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah/negara atau masyarakat tetapi juga menyerang kepentingan keamanan nasional berupa teror bom 3 Gereja yang berdampak menimbulkan potensi konflik di masyarakat sehingga mengganggu stabilitas nasional. Tujuannya untuk menganalisis hubungan koordinasi, kerjasama dan komunikasi secara efektif dan efisien serta hubungan timbal balik yang kreatif atas dasar kepercayaan antara instansi Kominda kota Surabaya dalam membantu pencegahan potensi Konflik. Dengan metode kualitatif yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara para nara sumber dan dokumentasi serta kunjungan ke instansi Kominda. Dalam teori sinergitas yang dianalisis menggunakan indikator dari Doctoroff serta didukung teori intelijen dan teori terorisme, pada pencegahan potensi konflik dianalisis dengan teori CEWERS menggunakan kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik tools-nya oleh Ichsan Malik dan Institut Titian Perdamaian. Instansi Komunitas Intelijen Daerah Kota Surabaya melaksanakan sinergitas dalam tugas dan tanggung jawabnya, namun pada pelaksanaannya belum optimal disebabkan masalah anggaran, SDM terdidik dan terlatih, dan ego sektoral. Pencegahan potensi konflik pasca aksi teror kunci utamanya adalah kepada akar dan faktornya, yaitu pencegahan gerakan radikalisme dalam masyarakat dengan penanaman nilai-nilai keagamaan yang moderat dan kebangsaan yang tinggi. Bahwa ke depan medan perang intelijen adalah informasi dan pembentukan opini. Pengalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya beraksi serta melakukan pencegahan dan penanggulangan atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil posisi inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan bagi kepentingan sendiri dan visi misi organisasi. Hal ini dilakukan untuk mewaspadaikan terhadap berbagai paham-faham radikal yang menyangkut penanaman kembali paham-faham anti Pancasila.

Kata Kunci: Keamanan Nasional, Pencegahan Potensi Konflik, Sinergitas, Stabilitas Nasional, Teror Bom 3 Gereja.

Abstract – Acts of terror that occurred in the city of Surabaya is the impact of riots in the Salemba branch prison in the Mako Brimob complex in Kelapa Dua, West Java. This action is not only aimed at the government / state or community but also attacks national security interests in the form of terror bombing 3 Churches which have an impact on the potential for conflict in the community so that it

¹ Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

² Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

³ Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

disrupts national stability, with the aim to analyze the relationship of coordination, cooperation and communication effectively and efficiently as well as relations creative reciprocity based on trust between the Surabaya City Commission agencies in helping prevent potential conflicts. With a qualitative method that is data collection techniques through interviewing resource persons and documentation as well as visits to Kominda agencies. In the synergy theory analyzed using indicators from Doctoroff and supported by intelligence theory and terrorism theory, the prevention of potential conflicts was analyzed by CEWERS theory using a dynamic framework of conflict prevention and resolution tools by Ihsan Malik and the Titian Institute of Peace. The Surabaya Regional Intelligence Community Agency has implemented synergy in its duties and responsibilities, but in its implementation it has not been optimal due to budgetary problems, educated and trained human resources, sectoral ego and lack of coordination. Prevention of the potential for post-terror conflict potentials is key to the roots and factors, namely the prevention of radicalism movements in society by inculcating moderate religious values and high nationality. That in the future the battlefield of intelligence is information and opinion formation. Media engagement and intense opinion without ignoring freedom of the press, must be done in a patterned and comprehensive manner. In this case, the key is not only to act and to prevent and deal with misinformation, but to take an innovative position to develop public opinion that is beneficial to one's own interests and the vision and mission of the organization. This is done to be aware of various radical ideologies that involve the planting of anti-Pancasila ideologies.

Keywords: Church Bomb Terror 3, National Security, National Stability, Prevention of Potential Conflicts, Synergy

Pendahuluan

Pada tahun 2018 aksi terorisme terjadi di Jawa Timur. Aksi terorisme tersebut terjadi dalam sepekan yaitu dari tanggal 9 Mei hingga tanggal 16 Mei 2018. Kejadian ini dimulai dari terjadinya kerusuhan di Rutan Cabang Salemba di Kompleks Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, hingga berlanjut sampai di kota Surabaya yaitu serangan bom yang terjadi di tiga gereja berbeda di pusat kota Surabaya.

Ledakan pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercelah, ledakan kemudian terjadi juga di Gereja Pantekosta Pusat

Surabaya (GPPS), dan Gereja Kristen Indonesia (GKI). Pelaku bom bunuh diri di tiga gereja tersebut adalah enam orang yang merupakan keluarga, ibu, ayah, dua anak laki-laki (18 dan 16 tahun), serta dua anak perempuan (12 dan 9 tahun).⁴ Kejadian peledakan bom teroris yang terjadi secara beruntun di kota Surabaya dan sekitarnya dilakukan oleh anggota kelompok Jemaah Anshorot Daulah (JAD) yang berada di Surabaya pendukung utama ISIS di Indonesia pimpinan Aman Abdulrahman yang ditahan di Mako Brimob Depok. Para pelaku teror bom merupakan warga Negara Indonesia yang

⁴ Feni Fitriani, "Pengamat Terorisme: Latar Belakang Pengeboman 3 Gereja di Surabaya" dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20180513/15/794389/pengamat-terorisme-ini-latar-belakang-pengeboman-3-gereja-di-surabaya/html> 13 Mei 2018, diakses pada 23 Juli 2019.

pernah tinggal di Irak dan Suriah dimana mereka telah didoktrin paham ideologi terorisme, karena kota Irak dan Suriah telah digempur oleh Amerika Serikat maka mereka kembali ke Indonesia (Deportasi) kemudian tinggal di Surabaya dan sekitarnya karena kota Surabaya banyak terdapat peluang dan fasilitas bagi mereka untuk bertahan hidup didukung juga lingkungan yang strategis dimana terdapat mayoritas aliran agama dan tempat sesuai dengan yang mereka anut.⁵ Karena dengan adanya kejadian penyanderaan dan kontak senjata antara tahanan teroris dan Brimob di Mako Brimob Depok dimana salah satu tahanannya merupakan Pimpinan mereka yaitu Aman Abdulrahman, maka mereka para pendukung ingin menunjukkan perhatian masih setia kepada Pemimpinnya. Kota Surabaya menjadi target peledakan karena mereka telah kehabisan dana dan akal serta mencari sasaran peledakan yang dekat dengan tempat mereka beraktifitas. Juga di ibu kota dengan kejadian Mako Brimob telah melaksanakan Siaga 1. Kelompok teroris identik dengan kelompok yang fundamental terhadap kelompoknya, di wilayah Jatim terdapat DPO, Napi dan

mantan Napi teroris yang cukup banyak, namun sampai saat ini sulit untuk diketahui sehingga kondisi ini merupakan ancaman di wilayah Jatim. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor bahwa aktivitas mereka banyak berbaur dengan kelompok masyarakat yang lain sehingga identifikasi terkait personal, rencana aksi dan jaringan penyandang dana masih sulit untuk dideteksi secara dini.

Pada pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam pasal tersebut disampaikan bahwa pertahanan negara dilakukan melalui segala upaya demi mempertahankan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dari segala ancaman dan gangguan.⁶ Sedangkan pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional

⁵ Ibid.

⁶ UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.⁷ Dalam pasal ini menjelaskan bahwa sistem Pertahanan Negara Indonesia adalah sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya lainnya demi tujuan menegakkan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dari segala kemungkinan ancaman yang ada.

Kebijakan Keamanan Nasional bahwa fungsi Keamanan Nasional yaitu akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang didalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tenteram dan tertib. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Keamanan Manusia adalah dasar dari Keamanan Nasional. Batas-batas Keamanan Nasional menjadi sangat luas justru karena subyek utamanya adalah warga negara.⁸ Penelitian ini berargumen bahwa Indonesia sudah memasukkan gagasan *human security* dalam

kebijakan Keamanan Nasionalnya. Keamanan Nasional menjadi fungsi dan tanggung jawab pemerintah yang sangat fundamental, karena keamanan nasional merupakan kepentingan Nasional yang vital. Dari sumber tersebut di atas, menjadikan pedoman peneliti bahwa dalam menjaga keamanan nasional fungsi pemerintah sangat berperan dengan melibatkan semua komponen bangsa. Sehingga bertolak dari fungsi pemerintah dan aparat keamanan ini menjadikan dasar penelitian di lapangan.

Kominda adalah sebuah *instrument* yang diawali dengan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi dalam rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Bentuk koordinasi diantara intelijen negara di daerah diwujudkan dalam wadah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), hal ini seperti yang dinyatakan pada Pasal 2 butir 2 Permendagri No. 16 Tahun 2011 yaitu: “Komunitas Intelijen Daerah yang

⁷ Ibid.

⁸ Fitrah, Elpeni, Gagasan *Human Security* dan Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal of Inetrnasional Relation*, Tahun 2015, Volume 2. Nomor 1. Halaman 13-29.

⁹ Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen.

selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota”, dengan penanggung jawab penyelenggara Kominda di tingkat provinsi adalah Gubernur sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota.¹⁰

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menjelaskan bahwa pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan dan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.¹¹ Di dalam UU tersebut telah dijelaskan mengenai upaya pencegahan konflik dengan membangun sistem peringatan dini, sebagaimana dimaksud yaitu dilakukan pemerintah dan pemerintah kota dengan cara antara lain “penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Pasal 11 ayat (e). Dalam pelaksanaannya untuk mencegah konflik sosial yang terjadi di masyarakat, melalui sistem peringatan

dini yaitu secara kelembagaan pemerintah kota bekerjasama sama dengan instansi intelijen di daerah. Untuk menjalankan fungsi peringatan dini secara efektif, lembaga-lembaga intelijen harus mampu mengidentifikasi sumber ancaman maupun dinamika lingkungan lokal, nasional, dan global yang juga berpotensi untuk mengancam Keamanan Nasional. Tidak hanya mengidentifikasi, lembaga intelijen juga harus dapat menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen terhadap dinamika sumber ancaman.¹²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan nilai di balik data yang tampak. Bahwa suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas perilaku, kejadian, tempat dan waktu.¹³ Penelitian metode kualitatif ini di harapkan menghasilkan

¹⁰ Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

¹¹ UU RI No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

¹² UU RI No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

¹³ Aan, Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta. 2017). hlm 72.

data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini dipilih karena metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.¹⁴

Penelitian ini membutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan, hal ini hanya dapat diperoleh dengan berbicara langsung dengan masyarakat, mendatangi rumah-rumah, atau tempat kerja mereka dan meminta menyampaikan cerita tanpa diganggu atau dihalang oleh dugaan atau pengharapan kita dan oleh apa yang kita baca dalam literatur. Untuk memperoleh data, dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam untuk mengumpulkan keterangan lisan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada sumber atau informan serta mengumpulkan data

pendukung lainnya melalui studi pustaka dan data sekunder dengan cara penelaahan dan perbandingan sebagai sumber penelitian, yang terdiri dari buku, jurnal, koran, majalah serta dokumen resmi dan dokumen resmi lainnya dari internet.¹⁵ Locus penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya, spesifikasi lokasi penelitian yang akan di tentukan berdasarkan daftar narasumber dan obvervasi lapangan.

Subjek Penelitian

Peneliti memposisikan dua subjek utama dalam penelitian ini dengan melihat peran pemerintah kota dalam hal ini Kesbangpol kota dan instansi intelijen daerah yang secara konstitusi merupakan pelaksana kegiatan peringatan dini untuk mencegah potensi konflik di kota Surabaya. Adapun Subyek dari penelitian ini adalah dari beberapa Nara Sumber sebagai berikut :

1. Nara Sumber Strategis

- a. Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Timur

¹⁴ John.W, Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desian Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 26.

¹⁵ Jhon.W, Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2104), hlm. 132.

- b. Komandan Lantamal V Surabaya
- c. Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya
- d. Kepala Kesbangpol Kota Surabaya.

2. Nara Sumber Operasional

- a. Kabid Kewaspadaan Dini Kesbangpol Propinsi Jawa Timur
- b. Staf Operasi BIN Jawa Timur
- c. Asintel Danlantamal V Surabaya
- d. Kepala Bidang Konflik Sosial Kesbangpol Kota Surabaya
- e. Pabandya LidPam Sintel Kodam V Brawijaya
- f. Kasatintelkam Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

3. Nara Sumber Taktikal

- a. Staf Kabid Konflik Sosial Kesbangpol
- b. Komandan Tim Intel Lantamal V Surabaya

- c. Kasiintel Korem 084/BJ adalah Dantim Intel Korem 084/BJ
- d. Tim Wijaya BAIS Surabaya.

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah di kota Surabaya yang menjadi bagian dari propinsi Jawa Timur yaitu meneliti pada Sinergitas Komunitas Intelijen Daerah dalam Membantu Pencegahan Potensi Konflik di Kota Surabaya Tahun 2018 (Studi Kasus: Teror Bom 3 Gereja).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini Peneliti akan mengumpulkan data melalui proses observasi, wawancara, dan studi literatur. Proses tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh valid dan semakin akurat. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber Kominda akan dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini, wawancara akan bersifat pertanyaan umum, tidak terstruktur dan bersifat terbuka.¹⁶ Sementara itu, studi literatur berupa buku, jurnal dan data terkait akan digunakan sebagai data sekunder sebagai pendukung data primer untuk memperkuat hasil akhir yang diperoleh, dalam penelitian pengumpulan data

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 105.

dokumen berupa regulasi atau peraturan terkait, perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dilapangan yang bersifat terbuka serta dokument lainnya yang relevan.¹⁷ Peneliti akan melaksanakan observasi pada semua kantor instansi Kominda di Kota Surabaya terkait berbagai macam program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, pengamatan ini dilakukan secara detail terhadap manusia dan lingkungan sekitar.

Hasil dan Pembahasan Sinergitas Komunitas Intelijen Daerah di Kota Surabaya

Sesuai Keputusan Walikota Surabaya bahwa tugas Kominda Kota Surabaya yaitu¹⁸:

1. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kota Surabaya.
2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi

Walikota Surabaya mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di kota Surabaya.

3. Mengadakan rapat secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
4. Membentuk Posko Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sesuai kebutuhan.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

Mengacu dari tugas tersebut di atas bahwa telah ada dasar hukum dan aturan yang dikeluarkan pemerintah kota Surabaya tentang tugas dan tanggung jawab Kominda kota Surabaya serta struktur organisasi. Selaku koordinator di tingkat propinsi, maka propinsi Jawa Timur yang membawahi kota Surabaya dalam hal ini Kesbangpol profinsi merencanakan kegiatan rapat rutin, mengkoordinir semua unsur Kominda serta mengumpulkan semua laporan

¹⁷ Jhon.W, Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 204.

¹⁸ Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/18/436.1.2/2018 tentang Kominda di Kota Surabaya. Tahun 2018.

informasi dari semua unsur Kominda. Adapun yang menjadi acuannya adalah 3 Pilar Plus yang telah ditetapkan Gubernur Jatim untuk pelaksanaan sinergitas Kominda di Jawa Timur. Melalui program Tiga Pilar Plus pemerintah Propinsi Jatim yaitu Gubernur, Pangdam dan Polda beserta jajaran di bawahnya di dukung oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bekerja sama untuk memperkuat sinergitas dalam menyelesaikan setiap konflik di masyarakat yang dimulai dari tingkat desa. Salah satu program utamanya yaitu optimalkan peran Komunitas Intelijen Daerah.¹⁹

Dari tingkat propinsi mengerucut pada tingkat kota Surabaya, dengan salah satu bentuk sinergitas yang dilakukan oleh Kominda kota Surabaya adalah dengan melaksanakan komunikasi yang efektif. Komunikasi diantara unsur Kominda kota Surabaya dapat berjalan efektif dengan adanya komunikasi dua arah dan saling timbal balik yang menandakan seluruh pihak memahami pesan yang disampaikan. Komunikasi terjadi secara rutin melalui tatap muka maupun telepon atau grup *whatsapp*. Komunikasi yang dilakukan Unsur

Kominda Kota Surabaya melalui komunikasi telepon atau group *whatsapp*, melalui komunikasi ini sudah terlihat adanya suatu upaya untuk lebih meningkatkan komunikasi secara cepat, tepat dan tak terbatas waktu. Karena kegiatan komunikasi yang efektif merupakan faktor yang sangat penting dalam menghimpun informasi.²⁰ Hal ini dilaksanakan guna dapat mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk potensi konflik di masyarakat. Komunikasi yang efektif dilakukan Kominda sebagai fungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan, serta karena melibatkan banyak orang dalam institusi yang berbeda atau lintas sektoral. Sebenarnya unsur Kominda kota Surabaya baik dari tingkat pengambil kebijakan sampai pada tingkat pelaksana dilapangan telah terjadi kerja sama yang saling bertukar informasi dan data. Sehingga terjadi umpan balik yang cepat untuk mendukung tercapainya visi dan misi semua unsur.

Baik pemerintah kota dalam hal ini Kesbangpol kota maupun komunitas intelijen daerah lainnya adanya saling

¹⁹ Sumber Data Kesbangpol Profinsi Jawa Timur, Tahun 2019.

²⁰ Ichsan, Malik, Mari Mencegah Konflik: Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis

Jaringan Komunikasi, (Jakarta: Tifa Foundation, 2005), hlm 301.

percaya dengan dibuktikan dari adanya keterbukaan, saling berbagi sumber daya, saling menerima, memberikan dukungan, dan saling bekerjasama dalam melakukan pemeliharaan kemandirian dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kota Surabaya. Hal ini didukung dengan adanya rapat rutin yang saling berbagi informasi, pendapat dan masukan antara sesama unsur Kominda serta adanya pelaksanaan dilapangan yang saling bertukar bahan keterangan (baket). Kominda melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dengan unsur intelijen yang berada di kota Surabaya untuk mencapai koordinasi yang efektif dalam membantu mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (AGHT). Rapat ini dilaksanakan sebulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan radikalisme dan terorisme. Namun apabila ada hal-hal yang bersifat khusus seperti terjadinya teror bom 3 Gereja tersebut maka dapat dilakukan setiap saat. Setelah pelaksanaan rapat koordinasi tersebut biasanya Kominda memberikan rekomendasi kepada Walikota Surabaya mengenai kebijakan yang berkenaan dengan deteksi dini dan

cegah dini terhadap ancaman stabilitas dan keamanan nasional di kota Surabaya, serta permasalahan yang berkembang selalu disampaikan seiring perkembangan lingkungan strategis. Dalam rangkaian kegiatan tersebut perlu didasari adanya rasa saling percaya sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan target operasi dapat tercapai dengan baik, aman dan lancar.

Kominda juga bersama-sama melaksanakan fungsi kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kominda sebagai suatu bagian dari instansi sangat kurang melaksanakan kegiatan penyelidikan.²¹ Kegiatan penyelidikan rutin ini hanya sebatas sebagai pemantauan atau monitoring wilayah yang lebih banyak dilakukan oleh anggota Kominda yang memiliki fungsi intelijen, sebab itu belum ada suatu skenario bersama anggota Kominda dalam melaksanakan penyelidikan. Namun alangkah baiknya apabila Kominda membuat suatu skema kegiatan pencarian data dan informasi, khususnya tentang bahaya radikalisme, terorisme hingga potensi konflik, sehingga instansi Kominda dapat

²¹ Toto, Gunarto, Kerjasama Aparat Intelijen Dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Terorisme di Wilayah Bekasi, *Tesis Magister Program*

Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan, Tahun 2018. hlm. 25.

mendeteksi secara dini setiap ancaman yang akan muncul baik dari dalam wilayah Kominda maupun dari luar.²² Dilapangan masih adanya harmonisasi antar unsur Kominda kota Surabaya diciptakan dengan adanya pelaksanaan wewenang masing-masing instansi dalam menjaga kepercayaan yang baik untuk meminimalisir kendala-kendala sinergi yang ada. Sinergitas ini merupakan kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan atas dasar saling percaya guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya.²³ Bahwa untuk memandu tindakan para anggota suatu organisasi diperlukan budaya organisasi yaitu asumsi, nilai, dan kepercayaan. Kepercayaan bersama harus menjadi kebiasaan yang telah berlangsung lama dalam hubungan organisasi, hal ini harus terus dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja agar dapat beradaptasi dengan lingkungan luar maupun lingkungan dalam untuk

mempengaruhi lingkungan kerja bersama.²⁴

Selain menjalankan tugas rapat koordinasi, Untuk mempercepat proses pencegahan dan penanggulangan potensi konflik dan ancaman keamanan di masyarakat, maka pemerintah kota Surabaya bekerja sama dengan pemerintah propinsi Jatim dan semua unsur Kominda Jatim membuat suatu aplikasi “SIAP MAS” (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelaporan Masyarakat). Adapun beberapa pelaporan masyarakat melalui TI (berbasis android) antara lain²⁵:

1. Pelaporan potensi konflik sosial
2. Pelaporan perkembangan/kejadian radikal/teroris
3. Pelaporan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
4. Pelaporan kegiatan orang asing (tenaga kerja asing, wartawan asing, rohaniawan asing, peneliti asing), ormas asing dan lembaga asing
5. Pelaporan perkembangan/aksi radikalisme/terorisme

²² Donny, Gahral, Adian, *Kita Tidak Dapat Hidup Tenang dan Aman Tanpa Intelijen*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014) hlm. 115.

²³ Anjaswari Wulandari, , “Optimalisasi Peran Komunitas Intelijen Daerah Dalam Deteksi Dini Konflik Komunal di Kota Pontianak” Tesis

Magister Program Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, Tahun 2014. hlm 45.

²⁴ Akhyadi, Kaswan , *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta,2015), hlm 256.

²⁵ Data Kesbangpol Profinsi Jawa Timur Tahun 2019.

6. Pelaporan perkembangan/aksi sparatisme
7. Pelaporan kebencanaan
8. Pelaporan pelanggaran HAM, serta
9. Pelaporan kerawanan sosial dan keamanan/ ketertiban lainnya

Menurut Doctoroff bahwa suatu unsur dengan unsur lain dapat dikatakan bersinergi apabila terdapat komunikasi yang efektif di antara unsur tersebut.²⁶ Pada level strategi, semua unsur Kominda kota Surabaya telah memiliki kesamaan visi dan misi strategis, yaitu adanya upaya-upaya dalam rangka menjaga keadaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan menjaga keselamatan bangsa, termasuk didalamnya mencegah terjadinya potensi konflik dan menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Melihat dari aspek tersebut seperti yang dikemukakan *doctoroff* diatas dapat terlihat dari kegiatan-kegiatan rapat rutin, kegiatan ceramah dan adanya komunikasi yang berlangsung erat antara unsur sehingga diharapkan dapat menciptakan kondisi yang di inginkan, sasaran yang jelas, upaya yang terfokus serta pengambilan keputusan yang tepat.

Semua unsur Kominda dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terutama korban aksi teror bom, menyusun dan menyiapkan kebutuhan korban teror bom serta melaksanakan kegiatan doa bersama antar umat beragama. Semua kegiatan ini didasari atas informasi yang didapat dari lapangan melalui Tim Terpadu selaku pengumpul bahan keterangan (baket). Walaupun pada pelaksanaannya dilapangan disebabkan oleh ketebatasan jumlah personel dan material khusus (matsus) yang tidak dimiliki oleh semua unsur Kominda, sehingga kadang terjadi ketimpangan informasi, atau keterlambatan informasi yang di peroleh. Keberhasilan pelaksanaan sinergitas di Kominda tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah kota, namun membutuhkan koordinasi dengan unsur lain, artinya perlunya sinergi antara pemerintah dengan sektor keamanan dan masyarakat. Dari hubungan ketiga ini diharapkan adanya timbal balik yang saling mendukung dan menguntungkan.

Pencegahan Potensi Konflik di kota Surabaya Tahun 2018

Pasca terjadinya beberapa teror bom di kota Surabaya, maka masyarakat mulai

²⁶ Retno, Suryawati, Sinergitas antar Satkeholder dalam Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH), *Jurnal Wacana Publik*, Tahun 2017, Volume 1. Nomor 1. Halaman 40.

merasa resah dan terancam oleh situasi yang mencekam sehingga mulai timbul opini-opini dan gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang ingin menyuarkan pendapat ke pemerintah kota Surabaya. Tingkat eskalasi potensi terjadinya konflik semakin meningkat dan meluas. Eskalasi deskalasi potensi konflik yang terjadi di kota Surabaya pasca teror bom 3 Gereja. Di lihat dari eskalasi deskalasi yang terjadi peneliti menganalisis berdasarkan temuan di lapangan bahwa unsur-unsur Kominda mampu meredam situasi dimana pimpinan-pimpinan Kominda terjun langsung ke lapangan untuk mencegah meluasnya dampak potensi konflik. Masyarakat Surabaya yang terkenal dengan budaya *Bonek* masih memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap korban aksi teror bom tersebut. Adapun tindakan yang di lakukan oleh Pemerintah kota Surabaya untuk meredam lebih meluasnya tingkat eskalasi menuju kepada potensi konflik yaitu melaksanakan pendekatan kepada keluarga korban teror bom dengan ikut membantu ibadah pemakaman korban, yaitu membeli peti jenazah, mendanai

acara pemakaman secara agama maupun adat. Tindakan lain yang dilakukan di lingkungan Masyarakat adalah seluruh unsur Kominda ikut serta dalam kegiatan Doa Bersama antara Umat beragama di halaman Gereja tempat kejadian yang di pimpin langsung oleh Walikota Surabaya Ibu Tri Risma. Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur Kominda telah melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap terjadinya potensi konflik dengan terjun langsung ke obyek pelaku sehingga tidak mengakibatkan eskalasi ancaman potensi konflik meluas. Peneliti melihat dan menganalisis menurut eskalasi konflik Glasl dari beberapa aksi dan kejadian massa dari data yang diperoleh dilapangan bahwa, eskalasi konflik tersebut masih dalam tahap *Hardening*, adalah tahap dimana munculnya perbedaan pandangan tentang pencegahan dan penindakan aksi terorisme.²⁷ Masyarakat khususnya kota Surabaya menilai bahwa pemerintah pusat maupun daerah masih lambat dalam menentukan kebijakan aturan hukum, dan pola pencegahannya dilapangan, terhadap paham radikal serta setiap aksi terorisme di Indonesia. Dalam

²⁷ Ichsan, Malik, *Refolusi Konflik, Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017) hlm. 108.

kasus teror bom di Surabaya peneliti menganalisis dari data-data yang diperoleh dilapangan bahwa masih bernuansa aksi damai berupa demonstrasi yang terkoordinir dengan aman dan aksi doa bersama antar umat beragama di kota Surabayan serta adanya pemasangan spanduk dan coretan-coretan di dinding yang mengecam dan menghujat aksi teror bom tersebut. Hal ini telah menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat Surabaya untuk ikut serta menegah aksi terorisme baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut apabila tidak di kontrol dan awasi secara penuh oleh aparat penegak hukum akan berujung pada konflik. Adapun beberapa kegiatan massa yang terjadi di kota Surabaya pasca teror bom, yaitu²⁸ :

1. Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, bertempat di depan patung Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo Surabaya telah dilaksanakan aksi keprihatinan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya yang diikuti sekitar 50 orang dengan membawa spanduk yang bertuliskan Lawan Teroris dari Bumi Surabaya, mereka

membacakan realise dan statemen dari HMI Surabaya.

2. Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, bertempat di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur Jl. Indrapura No. 1 Surabaya, telah dilaksanakan aksi unjuk rasa dari kelompok GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang mengatasnamakan LAMA (Lingkar Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan tema “Jatim Bangkit Melawan Terorisme dengan Spirit Reformasi” yang diikuti sekitar 75 orang.
3. Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, bertempat di Kantor DPW PKS Jawa Timur Jl. Gayungsari Barat X No.33 Surabaya telah berlangsung aksi unjuk rasa dari Aliansi Anti Terorisme, yang diikuti sekitar sekitar 40 orang dengan dikoordinir oleh Sdr. Norman, menyikapi statmen kader PKS di media sosial yang menyebutkan bahwa “kejadian teror bom bunuh diri di Surabaya adalah rekayasa”.

²⁸ Sumber Data Kesbangpol Kota Surabaya, Tahun 2018.

Selain beberapa aksi demonstrasi tersebut diatas, terjadi juga beberapa pemasangan poster-poster di berbagai jalan, coretan di tembok-tembok pinggir jalan yang mengutuk aksi teror bom di kota Surabaya. Melihat beberapa situasi tersebut diatas yang mulai menunjukkan adanya peningkatan eskalasi menuju kepada potensi konflik yaitu apabila aparat penegak hukum tidak cepat mengambil tindakan secara tegas dan benar tidak menutup kemungkinan akan ada gerakan-gerakan yang justru menopangi situasi tersebut melihat bahwa kejadian tersebut juga berdekatan dengan pemilihan Presiden. Pasca terjadinya beberapa teror bom di kota Surabaya, maka semua unsur penegak hukum bergerak cepat untuk segera mencari akar konflik, akselerator dan pemicunya. Hal ini terlihat dengan pengeledahan di rumah tersangka pelaku teror bom 3 Gereja di kota Surabaya. Berdasarkan data sekunder yang peneliti peroleh dilapangan, bahwa dalam melakukan aksinya bersama keluarga pelaku teror bom gereja tersebut telah terpapar dan terjaring oleh jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Surabaya.

Hal ini juga disampaikan oleh Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian pada *telekonferens* dengan Kompas di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya, Minggu (13/5/2018)²⁹. Untuk mempercepat proses pencegahan dan penanggulangan potensi konflik dan ancaman keamanan di masyarakat, maka pemerintah kota Surabaya bekerja sama dengan pemerintah propinsi Jatim dan semua unsur Kominda Jatim membuat suatu aplikasi “SIAP MAS” (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelaporan Masyarakat). Melalui program yang telah dibuat maka pemangku kepentingan bergerak cepat untuk mencegah meluasnya aksi teror bom dengan mencari, menemukan dan menangkap jaringan JAD Surabaya yang menjadi dalang aksi teror bom tersebut. Melalui Tim terpadu dan aplikasi “SIAP MAS” serta media massa bahkan media sosial aparat penegak hukum menginformasikan setiap aksi dan jaringan JAD tersebut agar tidak timbul berita-berita HOAX yang membingungkan apalagi manghasut masyarakat untuk mempercayai paham-paham radikal. Komponen pemangku kepentingan yaitu

²⁹ Gloria, Putri, “Teror Bom Surabaya, Merunut Teror Bom Surabaya” dalam <https://sains.kompas.com/read/2018/05/15/173>

000523/teror-bom-surabaya-merunut-sejarah-terbentuknya-keluarga-teroris/html, 19 April 2018, diakses pada 29 Juli 2019.

unsur-unsur Kominda yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah meluasnya konflik bertindak berdasarkan garis komando dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta berpatokan pada dasar-dasar hukum yang berlaku di NKRI. Aplikasi ini sangat membantu kinerja Kominda untuk bertindak cepat, tepat dan akurat dalam pencegahan dan penanggulangan keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Surabaya, masyarakat yang sudah memiliki aplikasi ini dapat langsung melaporkan kejadian dan akan dimonitor oleh seluruh unsur Kominda Adapun kebijakan Pemerintah kota Surabaya untuk mencegah dan mengatasi potensi konflik yang mengancam stabilitas Nasional mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui Tim terpadu dan aplikasi “SIAP MAS” serta media massa bahkan media sosial aparat penegak hukum menginformasikan setiap aksi dan jaringan JAD tersebut agar tidak timbul berita-berita *HOAX* yang membingungkan apalagi manghasut masyarakat untuk mempercayai paham-paham radikal. Komponen pemangku kepentingan yaitu unsur-unsur Kominda yang berkepentingan untuk menghentikan konflik serta mencegah

meluasnya konflik bertindak berdasarkan garis komando dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta berpatokan pada dasar-dasar hukum yang berlaku di NKRI. Aplikasi ini sangat membantu kinerja Kominda untuk bertindak cepat, tepat dan akurat dalam pencegahan dan penanggulangan keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Surabaya, masyarakat yang sudah memiliki aplikasi ini dapat langsung melaporkan kejadian dan akan dimonitor oleh seluruh unsur Kominda. Kejadian teror bom 3 Gereja di kota Surabaya adalah suatu pola baru dalam aksi terorisme dimana pelaku melibatkan istri dan anak (satu keluarga). Hal ini menjadi suatu gambaran bahwa akar-akar radikalisme harus segera di putus di tengah masyarakat sebelum berakibat kepada aksi teror yang terus terjadi. Lebih baik mencegah dari pada mengatasi. Oleh karena itu semua unsur Kominda telah merencanakan kegiatan untuk mendekati dan mengetahui inti permasalahan yang ada menjadi penyebab faktor konflik melalui Seminar, Talk Show, Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Ceramah Bahaya Laten Komunis dan Faham Radikal serta Wawasan Kebangsaan. Beberapa kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh unsur Kominda

melibatkan semua instansi di kota Surabaya, kegiatan ini difokuskan di wilayah tempat tinggal pelaku teror bom dan wilayah kejadian teror bom. Selain seminar dan ceramah, kegiatan ini juga bermaksud menggali informasi dari masyarakat secara langsung tentang perkembangan nilai agama, budaya dan kearifan lokal di wilayah tersebut. Masyarakat yang hadir lumayan banyak dan cukup antusias terhadap kegiatan seminar tersebut, dan ternyata banyak hal yang kita peroleh dari kegiatan ini bahwa sebenarnya tingkat kepedulian masyarakat cukup tinggi untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal di wilayahnya. Komponen aktor konflik ini selain menanamkan ketakutan ditengah masyarakat, para aktor juga menanamkan benih-benih ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada akhirnya yang mereka inginkan pengakuan masyarakat bahwa tindakan mereka benar. Melihat target keinginan tersebut, menjadi keharusan untuk membentengi diri dan tidak larut dalam ajakan mereka. Mereka akan datang kapanpun seolah sebagai pihak

paling benar dengan menuduh salah kepada pihak lain termasuk pemerintah. Pelaku teror bom tidak bergerak sendiri tetapi dalam jaringan JAD Surabaya, namun secara cepat, tepat dan aman pihak Kominda dan jajarannya mampu mendeteksi dan menangkap tokoh-tokoh jaringan lainnya untuk mencegah lebih luasnya aksi teror bom dan meredam rasa kecemasan di masyarakat serta untuk meyakinkan masyarakat akan kinerja dari pihak keamanan. Adanya keterlibatan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat mempengaruhi berapa besar dan luasnya pengaruh aktor konflik di kehidupan masyarakat.³⁰ Dari data yang di peroleh dari Kesbangpol Propinsi Jawa Timur bahwa hampir lebih dari 2.000 orang yang telah terpapar baik dari JAS, FPI, HTI, JAD, dan JAT.³¹ Ini menjadi tugas berat Kominda Jawa Timur. Komponen kemauan politik penguasa untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian, yaitu unsur pemerintah daerah Jatim dan pemerintah kota Surabaya yang berperan penting dengan mengeluarkan peraturan dan kebijakan agar potensi konflik tidak membara dan menyebar, serta adanya

³⁰ Bambang. Wahyudi, *Penanganan Konflik: Pendekatan Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Senja, 2018), hlm. 45.

³¹ Data Kesbangpol Kota Surabaya Tahun 2019.

kepedulian masyarakat untuk membantu dalam deteksi dini dan cegah dini tersebut. Pemerintah kota Surabaya tetap mendukung program kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah propinsi Jawa Timur dalam pencegahan dan penanggulangan konflik di wilayah Jawa Timur melalui Tim terpadu pencegahan dan penanggulangan konflik. Sinergi yang dilakukan oleh Kominda kota Surabaya juga di wujudkan ke dalam bentuk program deradikalisasi dan deideologisasi di lapas yang berada di kota Surabaya dan sekitarnya, karena pelaku teror yang sudah keluar dari lapas pun masih melakukan aksi teror bahkan tidak menutup kemungkinan jaringan tersebut terkoordinir dari dalam lapas.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) kota Surabaya telah bersinergitas untuk berperan dalam melaksanakan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik di kota Surabaya pasca aksi teror 3 bom Gereja namun belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori yang digunakan peneliti maka secara umum disimpulkan sebagai berikut:

1. Sinergitas yang dilakukan Kominda kota Surabaya yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/18/436.1.2/2018 tentang Kominda di Kota Surabaya belum berlangsung secara efektif. Bahwa peran deteksi dini Kominda belum berjalan secara optimal karena ditemukan kendala-kendala yang menghambat peran deteksi Kominda diantaranya masalah anggaran dimana kurangnya peralatan khusus (matsus) yang sesuai perkembangan teknologi sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan bahan keterangan, masalah koordinasi lanjutan dan masalah ego sektoral tentang kepentingan dalam berbagi informasi sehingga walaupun dipermukaan terlihat saling terbuka namun masih tertutup dalam pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini, serta masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dimana sebagian besar unsur-unsur Kominda kekurangan personel terdidik dan terlatih dilapangan.

2. Sedangkan pencegahan potensi konflik pasca aksi teror bom 3 Gereja di kota Surabaya Tahun 2018 oleh unsur Kominda kota Surabaya sudah berdampak untuk mencegah tingkat potensi konflik namun tidak berdampak untuk mengurangi aksi terorisme yang menjadi akar dan faktor potensi konflik tersebut. Hal ini disebabkan, pasca aksi teror bom 3 gereja masih berlanjut terjadinya aksi teror bom di polrestabes Surabaya dan Rusunawa Taman Sepanjang. Walaupun Kominda telah melaksanakan penangkapan aktor jaringan JAD Surabaya, melaksanakan Seminar Hukum serta terjun langsung ke lapangan untuk membantu korban aksi teror dengan memberikan bantuan material dan psikologis, namun hal tersebut hanya mencegah akibat aksi teror tanpa mencegah sebab aksi teror tersebut. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya Tim Terpadu dan program “SIAP MAS” dapat membantu deteksi dini dan cegah dini penyebaran paham-paham radikal. Di dukung pula, bahwa Pemerintah kota Surabaya

dengan berpedoman pada Undang-Undang No 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara antara lain menetapkan tentang hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara yang diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Dalam rangka sistem pertahanan, pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari upaya menumbuh kembangkan kesadaran bela negara sebagai hak dan kewajiban warga negara. Untuk itu upaya Pembinaan Kesadaran Bela Negara harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan.

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka dirumuskan beberapa saran antara lain :

1. Agar Sinergitas yang dilakukan Kominda kota Surabaya dapat berlangsung secara efektif, cepat dan efisien. Maka perlunya peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan khusus (matsus) yang sesuai perkembangan teknologi sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses

pengumpulan bahan keterangan (baket), perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara para pejabat yang pengambil keputusan sampai pada level pelaksana di lapangan sehingga terbentuk suatu kepercayaan yang menimbulkan kreativitas dalam melaksanakan visi dan misi, perlunya menghilangkan ego sektoral yang mementingkan kepentingan masing-masing unsur dalam memperoleh data di lapangan sampai pada pengambilan keputusan guna meningkatkan sinergitas antara unsur Kominda dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan nasional, serta perlunya penambahan personel terdidik dan terlatih dilapangan untuk mengumpulkan bahan keterangan di lapangan guna memperoleh data secara cepat, tepat, akurat dan maksimal.

2. Bahwa kunci utama pencegahan potensi konflik pasca aksi teror bom 3 Gereja di kota Surabaya

Tahun 2018 oleh unsur Kominda kota Surabaya adalah kepada akar dan faktornya, yaitu pencegahan gerakan radikalisme dalam masyarakat dengan penanaman nilai-nilai keagamaan yang moderat dan penanaman nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. Sehingga menumbuh kembangkan karakter masyarakat yang cinta tanah air serta rela berkorban demi kepentingan Negara dan Bangsa. Pelajaran penting yang diambil dari aksi teror bom 3 Gereja di kota Surabaya adalah dimana aksi ini dilakukan oleh satu keluarga dengan pola yang baru terjadi di dunia. Pelaku bom bunuh diri di 3 Gereja tersebut adalah enam orang yang merupakan keluarga, ibu, ayah, dua anak laki-laki (18 dan 16 tahun), serta dua anak perempuan (12 dan 9 tahun).³² Ledakan pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercelah, ledakan kemudian terjadi juga di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), dan Gereja Kristen Indonesia (GKI). Hal ini

³² Gloria, Putri, "Teror Bom Surabaya, Merunut Teror Bom Surabaya" dalam <https://sains.kompas.com/read/2018/05/15/173>

000523/teror-bom-surabaya-merunut-sejarah-terbentuknya-keluarga-teroris/html, 19 April 2018, diakses pada 29 Juli 2019.

memberikan gambaran kepada kita bahwa telah sejauh itu dan betapa kuat bentuk kejuangan aksi teror tersebut sehingga ikut mengorbankan anak istrinya. Hal ini menjadi kajian bagi unsur Kominda sebagai suatu instansi di bidang intelijen untuk lebih cepat, tepat, akurat, dan menyeluruh dalam mencegah dan menghambat meluasnya paham-paham radikal serta dampak dari aksi teror tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Bahwa ke depan medan perang intelijen adalah informasi dan pembentukan opini. Pengalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpolo dan konprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya beraksi serta melakukan pencegahan dan penanggulangan atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil posisi inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan bagi kepentingan sendiri dan visi misi organisasi. Hal ini dilakukan untuk mewaspadaikan terhadap berbagai paham-paham radikal yang

menyangkut penanaman kembali faham-faham anti Pancasila.

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gahral, Adian, Donny, dalam pengantar untuk buku *Filsafat Intelijen* tulisan dari A.M. Hendropriyono. (2014). *Kita Tidak Dapat Hidup Tenang dan Aman Tanpa Intelijen*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Kaswan, Akhyadi. (2015). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Komariah, Aan, dan Satori, Djam'an. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Malik, Ichsan. (2017). *Refolusi Konflik, Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Malik, Ichsan. (2015). *Mari Mencegah Konflik: Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan Komunikasi*. Jakarta: Tifa Foundation.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Wahyudi, Bambang. (2018). *Penanganan Konflik: Pendekatan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Senja.

Jurnal

- Elpeni, Fitrah. *Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional*.

(2015). *Jurnal of Inetrnasional Relation, Volume 2. Nomor 1.*

Retno, Suryawati. (2017). Sinergitas antar Satkeholder dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). *Jurnal Wacana Publik, Volume 1. Nomor 1.*

Tesis

Gunarto, Toto. (2018). Kerjasama Aparat Intelijen Dalam Deteksi Dini dan Cegah Dini Terorisme di Wilayah Bekasi. *Tesis Magister Program Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan.*

Wulandari, Anjaswari. (2014) “Optimalisasi Peran Komunitas Intelijen Daerah Dalam Deteksi Dini Konflik Komunal di Kota Pontianak” *Tesis Magister Program Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan.*

Peraturan dan Perundang-undangan

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/18/436.1.2/2018 tentang Kominda Kota Surabaya.

Website

Fitriani, Feni. “Pengamat Terorisme: Latar Belakang Pengeboman 3 Gereja di Surabaya” dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20180513/15/794389/pengamat-terorisme-ini-latar-belakang-pengeboman-3-gereja-di-surabaya/html>, diakses pada 23 Juli 2019.

Putri, Gloria. “Teror Bom Surabaya, Merunut Teror Bom Surabaya” dalam <https://sains.kompas.com/read/2018/05/15/173000523/teror-bom-surabaya-merunut-sejarah-terbentuknya-keluarga-teroris/html>, diakses pada 29 Juli 2019.